

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua

Insan Permana
Westim Ratang
Siti Rofingatun

Abstract

The aim of this research is to analyze the factors that influence the accountability of government agency performance at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Papua Province. This research is a type of quantitative research with the population used being employees at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Papua Province, totaling 187 employees. Based on the calculation of the sampling technique using the Slovin formula, the number of samples determined was 65 employees. The method used in this research is multiple regression analysis. Where this analysis method is a statistical method used to test the relationship between several independent variables and one dependent variable. The results of the analysis show that, the information system, internal control system and clarity of budget targets simultaneously influence the accountability of the performance of regional government agencies in the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Papua Province. The information system, internal control system and clarity of budget targets partially influence the accountability of the performance of regional government agencies at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Papua Province. Clarity of budget targets has a dominant influence on the accountability of the performance of regional government agencies at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Papua Province.

Keywords: *Regional Financial Management Information System, Internal Control System, Clarity of Budget Targets, Accountability of Government Agency Performance*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan populasi yang digunakan adalah pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua yang berjumlah 187 pegawai. Berdasarkan perhitungan teknik sampling dengan rumus slovin, maka jumlah sampel yang ditetapkan sebanyak 65 pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Dimana metode analisis ini merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil analisis menunjukkan bahwa, Sistem informasi, sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Sistem informasi, sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua.

Kata Kunci: *sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*

PENDAHULUAN

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud pertanggungjawaban pejabat pemerintah kepada publik tentang kinerja pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Fenomena yang terjadi saat ini dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk menghadapi akuntabilitas tersebut, pemerintah perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain kejelasan anggaran, pengendalian akuntansi, efektivitas pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya. Dengan adanya target pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti di tahun sebelumnya pemerintah Kota Medan melakukan tahap uji coba pada sistem pelaporan anggaran dan keuangan dengan menggunakan sebuah aplikasi yang berbentuk *web* yaitu sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua yang sebelumnya menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah).

Berbicara mengenai Papua, dimana Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan Daerah Otonomi Khusus yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur tentang tata kelola pemerintahannya, sehingga memiliki ciri-ciri khusus yang unik yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah lain yang ada di Indonesia, Provinsi Papua dan Papua Barat

merupakan Provinsi paling timur di Indonesia dan sekaligus paling jauh dari kedudukan Ibu Kota Negara sehingga dapat dikatakan bahwa pengawasannya dari Pemerintah Pusat paling sulit dan paling rawan dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya, serta adanya hasil audit BPK yang menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan dana otonomi khusus Papua mencapai Rp. 4,12 triliun (dari Rp.19,12 triliun yang diperiksa) selama periode 2020- 2022.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, diperlukan adanya penerapan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sebagai alat yang dapat mengontrol dan memberikan informasi atas adanya penggunaan keuangan daerah. Sistem sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran (Diah, 2015).

Selain sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah juga diperlukan sebagai tolak ukur dan peneraan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pengendalian yang menggunakan informasi akuntansi disebut sebagai sistem pengendalian yang berbasis akuntansi atau sistem pengendalian akuntansi. Sistem pengendalian akuntansi adalah semua prosedur dan sistem formal yang menggunakan informasi untuk menjaga atau mengubah pola aktivitas organisasi. Penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan para manajer dapat membuat keputusan-keputusan yang lebih baik, mengontrol operasi-operasi dengan lebih efektif, mampu mengestimasi biaya

dan profitabilitas keberhasilan tentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Anjarwati, 2012).

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Harapan (*Grand Theory*)

Grand theory yang mendasari penelitian ini Menurut Arfan (2018) dari sudut pandang teori agensi, principal (pemilik atau manajemen puncak) membawahi agen (karyawan atau manajer yang lebih rendah) untuk melaksanakan kinerja yang efisien. Teori ini berasumsi bahwa kinerja yang efisien dan kinerja organisasi dapat ditentukan oleh usaha yang telah dilakukan serta pengaruh kondisi lingkungan. Sementara itu, secara umum teori ini berasumsi bahwa principal tersebut bisa bersikap netral terhadap resiko berbeda dengan agen dimana agen cenderung bersikap menolak usaha dan risiko. Mengacu pada sebuah teori yakni teori agensi (*agency theory*), akuntabilitas publik adalah kewajiban dari pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan seluruh pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan segala sesuatu aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya

kepada pihak memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Faristina, 2011).

Berkaitan dengan berbagai masalah dalam keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam suatu organisasi sektor publik adalah satu konsep dimana berdasarkan dari teori keagenan. Dalam pelaporan keuangan tersebut, pemerintahlah yang memegang posisi sebagai agen yang mendapat kewajiban untuk memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas serta mampu membuat keputusan yang baik dari segi keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian dari Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, efektif, ekonomis, transparan, akuntabel dan juga auditabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif secara parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Lingkungan pengendalian adalah komponen pengendalian internal. Jika suatu pemerintahan memiliki suasana kerja, lingkungan dan kontribusi yang baik maka akan

meningkatkan kinerja dari instansi pemerintah. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011) sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan entitas lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian dalam keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Medelyn Sonya Mikoshi (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian interen berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hal ini berbeda dengan penelitian Ima Reza Viola (2023) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian interen tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₂: Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Ginting (2010), kejelasan sasaran anggaran adalah sebagai berikut: Sejauhmana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh sebab itu sasaran anggaran pemerintah daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia Cantika (2018) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi pemerintah di berbagai tingkatan, dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya Negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Laporan akuntabilitas kinerja instansi adalah laporan kinerja tahunan. Laporan akuntabilitas lazimnya juga dimasukkan sebagai laporan kinerja. Jadi, laporan akuntabilitas kinerja sama dengan LAKIP dan LAKIP pada dasarnya sama dengan laporan kinerja tahunan (BPKP, 2011) Sistem pelaporan seringkali dikembangkan terintegrasi dengan sistem-sistem lainnya.

Pengendalian Akuntansi mencakup struktur organisasi dan seluruh metode dan yang terutama menyangkut dan berhubungan dengan penjagaan terhadap kekayaan perusahaan dan menjamin ketelitian data keuangan. Pengendalian akuntansi dapat memastikan pencatatan sesuai standar yang berlaku pada setiap transaksi keuangan secara akurat dan dapat meminimalisasi adanya kesalahan pencatatan. Prosedur pengendalian akuntansi memiliki tujuan yaitu informasi keuangan harus dapat dipercaya sehingga pengelola mendapatkan informasi yang akurat untuk perencanaan program dan pengambilan keputusan lainnya, aktiva dan catatan-catatan organisasi tidak dicuri, disalahgunakan, atau dirusak dengan sengaja, kebijakankebijakan yayasan diikuti, dan peraturanperaturan pemerintah terpenuhi.

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifikasi dan dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya, oleh sebab itu Kejelasan Sasaran Anggaran dapat dilihat dari besar atau kecilnya pengaruh dalam merumuskan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran menjadi suatu hal yang sangat relevan dan penting di lingkup pemerintahan karena dampaknya terhadap akuntabilitas pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran di tetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran diperkirakan dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan adanya kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan yang jelas dapat meningkatkan kinerja manajerial khususnya pada pengelolaan keuangan pemerintah untuk mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher (2019) tentang Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati menunjukkan bahwa secara simultan variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₄: Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan current status dari subjek yang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah 187 pegawai BPKAD Provinsi Papua. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan metode analisis regresi berganda dengan bantuan aplikasi SPSS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji frekuensi yang dilakukan mengenai mengenai variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 8 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,19 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua sudah didukung dengan adanya perangkat dan *software* yang memadai. Adanya system informasi pengelolaan keuangan daerah yang didukung dengan perangkat yang memadai dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengujian pengaruh variabel system informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dengan menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variable system informasi sebesar 0,034 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi sebesar 0,304. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Medelyn Sonya Mikoshi (2020) yang menunjukkan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Dalam hal pengurusan dan pengelolaan keuangan daerah, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah sangat perlu dilakukan karena akan menentukan bagaimana pengelolaan serta penggunaan keuangan daerah dengan baik. Dalam hal ini, istem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna memudahkan pengelolaan keuangan yang ada. Ratih (2016) menyatakan bahwa rancang bangun dan pemahaman istem informasi pengelolaan keuangan

daerah menjadikan sebuah proses menjadi mudah dan cepat serta kemampuan penatausahaan keuangan daerah dan pengelolaan barang milik daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja OPD.

Sistem sistem informasi pengelolaan keuangan daerah merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem pelaporan diperlukan untuk memantau hasil kerja pusat pertanggungjawaban. Dalam laporan harus ditunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, sehingga dapat diketahui penyimpangan terhadap anggaran (Diah, 2015).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua sejak Tahun 2018 adalah berbasis akrual dan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2018 hingga tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun pada tahun 2022 hasil Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2022 adalah berbasis akrual dan BPK memberikan opini terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan laporan BPK pada tahun 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua menyajikan realisasi belanja daerah senilai RP. 11,45 triliun. Dari nilai tersebut, diantaranya terdapat realisasi belanja senilai RP. 1,5 triliun yang melampaui anggaran induk dengan rincian yaitu Belanja Barang dan Jasa senilai Rp. 403,70 miliar, Belanja Hibah senilai Rp. 437,44 miliar, Belanja Bantuan Sosial senilai Rp. 27,45 miliar, Belanja Modal senilai Rp. 466,11 miliar dan Belanja Tak Terduga senilai Rp. 141,02 miliar.

Atas pelampauan realisasi belanja tersebut, Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan Anggaran Perubahan sesuai Peraturan Gubernur Papua Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, namun penetapan Peraturan Gubernur tersebut tidak melalui persetujuan bersama DPRD dan pengesahan Menteri Dalam Negeri serta pelaksanaan dan substansi belanja tersebut tidak sepenuhnya memenuhi kriteria antara lain yaitu keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai akibatnya, BPL tidak dapat menentukan penyesuaian yang diperlukan terhadap pelampauan realisasi belanja tersebut dan dampaknya terhadap penyajian belanja Pemerintah Provinsi Papua tahun 2022.

Penelitian yang dilakukan oleh Zelda Triyani (2018) menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah mempengaruhi laporan keuangan di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Metro. Sistem Informasi Akuntansi adalah seperangkat sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, mencatat serta mengolah transaksi-transaksi data sehingga menghasilkan informasi untuk disajikan bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Salah satu faktor pendukung kualitas laporan keuangan adalah sistem informasi akuntansi, dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik. Dengan demikian diharapkan laporan keuangan yang dihasilkan dapat memenuhi informasi yang diharapkan dan mampu meningkatkan kualitas hasil dan tersedianya laporan keuangan yang tepat waktu.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji frekuensi mengenai variabel sistem pengendalian internal pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 10 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,12 berada pada kategori setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua sesuai dengan kriteria dan aturan yang

berlaku. Dengan adanya system pengendalian internal pemerintah yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengujian pengaruh variabel sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel sistem pengendalian internal sebesar $0,042 < \alpha (0,05)$ dan koefisien regresi 0,389. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal pemerintah secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rusnanda Dian Kartika, Sukamto (2019) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Mehaela dan Lulian (2015) menyatakan bahwa *corporate governance* dan pengendalian internal tidak boleh dilihat secara terpisah. Sebuah organisasi tanpa sebuah cara pandang pemimpin jangka panjang yang efisien, mekanisme pengendalian internal yang efektif tidak akan dapat bertahan. Oleh karena itu *corporate governance* tidak akan berjalan efektif tanpa pengendalian internal yang baik.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP pada bagian kedua mengenai pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Inspektorat daerah merupakan pengawas internal (internal auditor) dalam pemerintah daerah. Sebagai pengawas internal, keberadaan inspektorat daerah dinilai sangat penting dilihat juga dari fungsi dasarnya yaitu melakukan pengawasan pada seluruh kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengawasan pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan melalui evaluasi dan perbaikan pengendalian internal, manajemen risiko dan proses tata kelola pemerintahan (Aikins 2016).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh

pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Teori agensi pihak *principal* adalah pihak yang memberi mandat kepada pihak lain yaitu agents untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principal* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Penyimpangan dan kebocoran masih banyak ditemukan di dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat memberi keyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Semakin baik Sistem pengendalian internal maka semakin baik akutabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pemerintah Provinsi Papua untuk memberantas KKN pada berbagai aspek dan harapan gubernur untuk mendapatkan keyakinan yang memadai terkait dengan tujuan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dikatakan bahwa SPIP di daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah. Untuk itu setiap pejabat daerah perlu memahami hal tersebut secara mendalam. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini adalah bagaimana mewujudkan *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN. Beliau menambahkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan amanah dari reformasi keuangan negara. Terdapat tiga tujuan pokok reformasi keuangan negara, yaitu tercapainya kinerja, transparansi, dan akuntabilitas keuangan negara, termasuk di dalamnya adalah sistem pengendalian intern yang mendukung ketiga tujuan pokok tersebut. Sistem pengendalian intern ini telah diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 2004 pasal 58, bahwa

dalam rangka meningkatkan kinerja, meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara dan daerah, maka presiden harus merumuskan dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini dimaksudkan agar para pejabat daerah dapat mengimplementasikan SPIP tahun 2010 dengan indikator keberhasilan berupa opini WTP.

Penelitian yang dilakukan oleh Ana 'Ainul Mukarromah (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah Kota Probolinggo. Dengan sistem pengendalian internal yang baik dan memadai akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Probolinggo. Sistem pengendalian internal menjadi hal utama dalam organisasi karena didalam suatu organisasi sangat membutuhkan kebijakan khusus yang dapat mengkoordinasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Dan sistem pengendalian internal dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil uji frekuensi mengenai variabel kejelasan sasaran anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua tergolong baik karena rata-rata jawaban responden dari 8 item pertanyaan yang diberikan memiliki rata-rata jawaban sebesar 4,16 berada pada kategori setuju. Artinya bahwa, kejelasan sasaran anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua telah dilakukan sesuai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan adanya anggaran yang jelas akan memiliki dampak yang baik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengujian pengaruh variabel kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah menggunakan uji statistik t dan diperoleh hasil tingkat signifikansi variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ dan koefisien regresi 0,597. Kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam membantu aparatur

pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang cukup dan mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran anggaran yang tidak jelas atau membingungkan akan mengakibatkan ketidakpastian kepada para pelaksananya sehingga berimplikasi pada menurunnya suatu kinerja yang berarti juga menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan visi misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan didukung dengan dana DAU (Dana ALokasi Umum), PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan DBH (Dana Bagi Hasil) sebesar Rp. 190.589.081.689,00 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 124.059.529.830,00 dan Belanja Langsung Rp. 66.529.551.859,00. Untuk mencapai tujuan diwujudkan melalui 8 (delapan) program dan 70 Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua Telah berhasil dalam melaksanakan beberapa sasaran dengan capaian realisasi anggaran mencapai 84,05% (BPKAD Provinsi Papua).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan dan Asset Daerah Provinsi Papua seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik, namun masih ada kegiatan yang tidak dilaksanakan yaitu Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Papua, Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan. Dari kelima kegiatan yang tidak terlaksana dan Penyerapan atau Realisasi dari beberapa kegiatan yang relative rendah itulah yang mempengaruhi sehingga capaian hanya 84,05 % (BPKAD Provinsi Papua).

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 84,21% menunjukkan adanya penurunan pelaksanaan program dan kegiatan dari segi anggaran yang

disebabkan kurangnya kerjasama, koordinasi para pimpinan dan staf di lingkungan Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Provinsi Papua. Dengan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan menjadi informasi yang wajib secara periodik dikomunikasikan kepada para stakeholders dan masyarakat yang selanjutnya dievaluasi oleh instansi yang melaksanakan fungsi evaluasi (BPKAD Provinsi Papua). Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hafzhan (2021) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Adanya kejelasan sasaran anggaran akan membuat para pelaksana anggaran lebih mempertanggungjawabkan kinerjanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Fadila dan Budiwitjaksono, 2022). Sistem pelaporan merupakan suatu sistem yang menjadi pertanggungjawaban bawahan kepada atasan atas segala aktivitas yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu untuk dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sistem pelaporan ini nantinya akan memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan kinerja suatu instansi pemerintah daerah. Sistem pelaporan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat ketidakpastian atas suatu masalah yang dihadapi oleh pengambil keputusan dan memunculkan tindakan yang tepat dalam mengatasi suatu permasalahan yang terjadi (Pitaloka dan Handayani, 2019).

Adanya hasil yang belum konsisten antara kejelasan sasaran anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menandakan bahwa masih terdapat sasaran anggaran yang belum jelas disebabkan dari pelaksanaan anggaran yang masih bingung, belum tenang dan belum puas dalam bekerja. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan anggaran belum termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga terjadinya

penurunan dalam akuntabilitas kinerjanya. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ima Reza Viola (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kejelasan Sasaran Anggaran Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji F pada pengujian hipotesis pertama, dapat disimpulkan bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap variabel terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} 38,030 > nilai F_{tabel} 10,579. Karena nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ ($\alpha = 0,05$) maka H_0 ditolak atau H_1 diterima. Hal ini berarti semua variabel independen (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno (2020) yang menunjukkan bahwa bahwa variabel sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Hal ini berarti bahwa dengan adanya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kejelasan sasaran anggaran yang jelas dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah khususnya pada pengelolaan

keuangan pemerintah untuk mendukung meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

SIMPULAN

Dari analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan penelitian, maka dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dapat diartikan sebagai catatan dan laporan koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah guna memudahkan pengelolaan keuangan yang ada
2. Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah maka dapat memengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Semakin baik Sistem pengendalian internal maka semakin baik akutabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Kejelasan sasaran anggaran secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang dominan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua. Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rudi Yulianto, Osmad Muthaher. 2019. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati*.
- Amir Abdi Yusuf. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Anatasia, Dana Rizky. 2018. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan)*. Jurnal Politeknik Negeri Sriwijaya, Vol. 2, No. 1.
- Anjarwati, Mei. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1–7. doi:ISSN 2252-6765.
- Arfan Ikhsan Lubis. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Madenatera.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Penerbit Erlangga: Jakarta.
- Deki Putra. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah, Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang*. Jurnal. Universitas Negeri Padang <http://www.google.com/Fejournal.unp.ac.id>.
- Ginting, Hartika Sari. 2009. *Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Perangkat Daerah Di Pemerintahan Kabupaten Karo*. Thesis: Universitas Sumatera Utara.
- Ima Reza Viola. 2023. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Riset Akuntansi Aksioma 22 (1): 92-102.
- Indraswari Kusumaningrum. 2010. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*". Tesis Pascasarjana Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur and Bambang Supomo. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. Edisi 1. Cetakan ke-12*. Yogyakarta: BPF.
- Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kinasih, Heksi. 2018. *Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas*

- Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo)*. Other thesis. Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Medelyn Sonya Mikoshi. 2020. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Emperis Koni Se Sumatera Barat)*. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4 (1): 192-199.
- Mudrikah Fika, Kurnila Ali. 2019. *Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur)*. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*. Vol. 3 No. 2: 166 – 188.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Perwirasari, F. B. P. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. *Jurnal Akuntansi*, Vpl. 1 No. 1.
- Restu Widiya. 2017. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Penekanan Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Indragiri Hulu)*. *JOM Fekon*, Vol. 4, No. 1.
- Rosalin, Faristina dan Warsito Kawedar. 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keandalan Dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Studi pad BLU di Kota Semarang)*. Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro. Diunduh dari <http://eprints.undip.ac.id/29439/1/jurnal.pdf>.
- Rusnanda Dian Kartika, Sukamto. 2019. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Dinas Daerah Kota Surabaya)*. *Jurnal Akuntansi*, Vol 2, No. 3.
- Sekaran, Uma. 2014. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis (Research Methods for Business) Buku 1 Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sudaryo, Yoyo. 2017. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Cetakan Ke-27*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

- Toman, Sony Tambunan. 2016. *Grosarium Istilah Pemerintahan. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- Yogi Isnanto, Suharno, Bambang Widarno. 2020. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 15 Edisi Khusus Oktober 2019: 489-501.
- Yulianto, Ahmad Rudi. 2019. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati*. Jurnal Akuntansi, Vol.14, No 2.
- Yulia, Cantika. 2018. *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2. Nomor 1.